

**PENGUMUMAN**
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERDINAN NURDIN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 659769

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/98 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/400 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 140.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX ABS Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NAV 1 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.390.000.000

III. HUTANG

Rp. 1.150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.240.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.